Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Volume. 4 Nomor. 2 Mei 2025
e-ISSN : 2809-0268; p-ISSN : 2809-0403, Hal. 20-35
DOI: https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.3919
Available online at: https://journalcenter.org/index.php/inovasi

Analisis Partisipasi Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Pandeglang

Laeli Nur Khanifah[1], Yosphia Fahruddiana[2]
[1,2] Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten
E-mail: khanifah92@untirta.ac.id [1], yosphiafahruddiana5@gmail.com[2]

Abstract :
This study aims to analyze the role of the Forum Anak (Children's Forum) in Pandeglang Regency in realizing a Child-Friendly City (KLA), with a focus on the implementation of the 2P functions (Pioneer and Reporter) in the participatory process. The Forum Anak is designed as a channel for conveying children's aspirations to the government, in line with Regional Regulation No. 1 of 2021 of Pandeglang Regency. The results of the study show that the Forum Anak of Pandeglang Regency has actively involved children in various programs and activities, such as capacity-building training and public consultation forums. However, challenges remain in spreading knowledge about children's rights and expanding the involvement of Forum Anak across all areas of the regency. Overall, the participation of Forum Anak is categorized at the "Degrees of Tokenism" level in the Ladder of Participation theory, primarily at the consultation level and partially at the placation level. Moving forward, steps are needed to provide greater opportunities for Forum Anak in designing and evaluating policies to achieve a more effective partnership level in realizing KLA. This study is expected to contribute to the development of a model for children's participation in regional development planning.

Keywords**: **Children's Forum, , Pioneer, Reporter, Child-Friendly City (KLA)

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Forum Anak Kabupaten Pandeglang dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), dengan fokus pada penerapan fungsi 2P (Pelopor dan Pelapor) dalam proses partisipasi. Forum Anak dirancang sebagai saluran untuk menyampaikan aspirasi anak-anak kepada pemerintah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Anak Kabupaten Pandeglang telah aktif melibatkan anak-anak dalam berbagai program dan kegiatan, seperti pelatihan kapasitas dan forum konsultasi publik. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam meratakan pengetahuan mengenai hak anak dan memperluas keterlibatan Forum Anak di seluruh wilayah kabupaten. Secara keseluruhan, partisipasi Forum Anak dapat dikategorikan pada tingkat "Derajat Semu" dalam Teori *Ladder of Participation*, dengan dominasi pada tingkat konsultasi dan sebagian kecil pada penentraman. Ke depan, diperlukan langkah-langkah untuk memberikan ruang lebih besar bagi Forum Anak dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan, agar mencapai tingkat kemitraan yang lebih efektif dalam mewujudkan KLA. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan model partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan daerah..

Kata kunci: **Forum Anak, Pelopor, Pelapor, Kota Layak Anak (KLA)**

1. PENDAHULUAN

Forum Anak berpotensi menjadi wadah pemberdayaan, tetapi tanpa komitmen nyata, partisipasi anak dapat menjadi simbolis tanpa dampak kebijakan (Atikah et al., 2024; Hikmawan & Maulida, 2020; Resdati et al., 2022; Rofikoh, 2018). Pembangunan inklusif harus melibatkan kelompok rentan, termasuk anak-anak, sebagai agen perubahan (Resdati et al., 2022). Forum Anak Pandeglang seharusnya menjadi motor perubahan dengan dukungan pemerintah, bukan sekadar formalitas (Atikah et al., 2024; Patty et al., 2023).

Received: Februari 15, 2025; Revised: Maret 20, 2025; Accepted: April 07, 2025;
Online Available: April 14, 2025; Published: Mei 30, 2025

Sebagai organisasi partisipatif berbasis regulasi pemerintah, Forum Anak dirancang untuk mengembangkan potensi anak sekaligus menyalurkan aspirasi mereka kepada pemangku kebijakan (Rihardi et al., 2023; Oktaviani & Susanti, 2023). Forum ini beroperasi melalui sistem *dual function* yaitu sebagai pelopor (*agent of change)* dan pelapor (advokasi kebijakan) (Atikah et al., 2024; Jannah et al., 2022). Dengan struktur yang tersebar dari tingkat nasional hingga lokal termasuk di Pandeglang, Forum Anak memfasilitasi partisipasi aktif anak dalam pembangunan melalui pendampingan pemerintah dan kerangka regulasi yang jelas (Oktaviani & Susanti, 2023; Atikah et al., 2024).

Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) berfungsi sebagai panduan strategis pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap pemenuhan hak anak (Amelia, 2023; Oktaviani & Susanti, 2023). Regulasi ini mengamanatkan pendekatan partisipatif dan inklusif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak (Mahmud & Suandi, 2020).

Berdasarkan kerangka regulasi ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi ganda Forum Anak Pandeglang (2P: Pelopor dan Pelapor) dalam mendukung terwujudnya Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA. Fokus kajian mencakup efektivitas Forum Anak sebagai (1) *Agent of change* (pelopor) di tingkat komunitas; (2) *Advocacy platform* (pelapor) dalam proses pengambilan kebijakan

Penelitian tentang fungsi Forum Anak sangat penting untuk menilai sejauh mana perannya berhasil menciptakan Kota Layak Anak. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti Jannah dkk. (2022), menemukan bahwa Forum Anak masih mengalami kendala dalam melibatkan masyarakat dan melakukan advokasi. Hal serupa diungkapkan oleh Hikmawan & Maulida (2020), yang menyarankan perlunya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Forum Anak. Sementara itu, Yuniati dkk. menekankan bahwa keberhasilan kebijakan layak anak membutuhkan kerja sama banyak pihak, meskipun sumber daya terbatas. Penelitian ini penting karena Forum Anak berperan sebagai agen perubahan di tingkat masyarakat dan penghubung aspirasi anak dengan pemerintah. Jika Forum Anak gagal menjalankan fungsinya sebagai pelopor dan pelapor (2P), target Kabupaten Pandeglang sebagai Kabupaten Layak Anak bisa terhambat.

Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Menurut Sedarmayanti (2007), partisipasi berarti

memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk hak mereka untuk berkumpul, membentuk kelompok, dan terlibat aktif dalam pembangunan. Dalam konteks ini, Forum Anak menjadi sarana penting agar suara dan hak anak didengar serta diperhatikan dalam pembuatan kebijakan yang memengaruhi mereka. Tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti pemahaman pemerintah tentang cara melibatkan masyarakat secara efektif, pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah, jumlah dan kualitas masukan masyarakat dalam proses pembangunan, serta meningkatnya kepedulian warga terhadap proses pembangunan tersebut (Sedarmayanti, 2007).

Selain itu, Arnstein (2019) dalam *"Ladder of Participation"* menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki berbagai tingkat, mulai dari sekadar formalitas hingga pemberian kekuasaan penuh kepada warga. Ia membagi partisipasi ke dalam tiga kategori utama*: pertama*, Tidak Partisipatif (*Non-Participation)*, yang mencakup manipulasi dan terapi, di mana masyarakat hanya berperan sebagai objek pasif tanpa diberikan kesempatan berpengaruh; *kedua*, Partisipasi Semu *(Degrees of Tokenism)*, yang meliputi pemberian informasi, konsultasi, dan penentraman, di mana keterlibatan masyarakat masih terbatas dan belum mampu memengaruhi keputusan secara signifikan; dan *ketiga*, Kekuatan Masyarakat *(Degrees of Citizen Power)*, yang mencakup kemitraan, pendelegasian kuasa, hingga kendali penuh oleh warga sendiri, sehingga memungkinkan partisipasi yang benar-benar demokratis dan memberi kekuatan nyata kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks Forum Anak, teori ini menjadi relevan untuk menganalisis sejauh mana partisipasi anak diakomodasi dalam proses Pembangunan apakah sekadar bersifat simbolis (*tokenism*) atau telah mencapai tingkat kemitraan bahkan pemberdayaan penuh.

Temuan Jannah et al. (2022) dan Hikmawan & Maulida (2020) menunjukkan bahwa partisipasi anak seringkali masih berada pada tingkat konsultasi, tanpa diikuti oleh transfer kekuasaan yang nyata. Padahal, idealnya Forum Anak harus mampu mencapai tingkat *partnership* atau *delegated power* agar aspirasi anak benar-benar berpengaruh terhadap kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengevaluasi posisi partisipasi Forum Anak Kabupaten Pandeglang dalam *Ladder of Participation*, sekaligus mengidentifikasi faktor pendorong atau penghambat dalam mencapai partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Hasilnya diharapkan dapat memperkuat peran

Forum Anak sebagai agen perubahan (*pelopor*) dan mitra kritis (*pelapor*) dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang inklusif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Cresswell menyatakan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian yang ideal ketika peneliti ingin menjawab pertanyaan "bagaimana" atau "mengapa" suatu fenomena terjadi, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami kasus unik atau kompleks yang dapat memberikan wawasan baru bagi pengembangan teori atau praktik (Creswell, 2015; Nur'aini, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Forum Anak Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023 dalam mendukung fungsi Pelopor dan Pelapor dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Penelitian dilakukan pada periode Oktober hingga Desember 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana Forum Anak berkontribusi sebagai agen perubahan dalam mendukung kebijakan ramah anak serta menilai efektivitas strategi yang mereka gunakan dalam menyuarakan aspirasi anak-anak di Kabupaten Pandeglang (Rihardi et al., 2023). Sasaran penelitian meliputi anggota Forum Anak, pejabat pemerintah daerah terkait, serta masyarakat yang terlibat dalam program Kota Layak Anak.

Subjek penelitian terdiri atas anggota Forum Anak Pandeglang yang aktif pada tahun 2023 dan 2024, pemangku kepentingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten. Prosedur penelitian dimulai dengan tahap persiapan, yaitu pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), serta observasi Forum Anak. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan tahunan, serta publikasi yang relevan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, dan catatan sekunder (Creswell, 2015). Teknik analisis data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran Pelopor dan Pelapor. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan triangulasi sumber data untuk memastikan validitas hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan landasan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berfokus pada pemenuhan hak anak. Kebijakan ini menekankan integrasi komitmen serta sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta secara terencana, dan berkesinambungan (Yuniati et al., 2021). Tujuannya adalah menciptakan sinergi lintas sektoral yang mampu mendukung terpenuhinya hak-hak anak di setiap aspek pembangunan. KLA bukanlah kebijakan normatif, tetapi upaya untuk mentransformasikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari sekadar kerangka hukum menjadi langkah nyata dalam definisi, strategi, serta intervensi pembangunan daerah (Mahmud & Suandi, 2020). Transformasi ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan konkret yang didesain untuk menciptakan lingkungan kabupaten/kota yang ramah anak.

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), pemerintah kabupaten/kota harusnya mampu mengintegrasikan isu-isu prioritas, seperti perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan pengembangan kualitas hidup anak, ke dalam perencanaan dan implementasi pembangunan (Suyanto, 2018). Integrasi ini melibatkan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah provinsi dan pusat, sehingga menciptakan kesinambungan dalam kebijakan dan program yang berpihak pada anak. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjadikan pembangunan berkelanjutan yang inklusif terhadap hak-hak anak sebagai salah satu pilar utama keberhasilan.

Kegiatan Evaluasi KLA akan mengevaluasi pencapaian daerah terhadap 24 indikator yang terbagi ke dalam beberapa klaster utama, yaitu:

Tabel 1. Klaster Indikator KLA

Kelompok	Nama Klaster	Jumlah Indikator	Rincian Indikator
1	Kelembagaan	3	Mengukur kapabilitas struktural pemerintah daerah dalam melaksanakan program KLA.
2	Hak Sipil dan Kebebasan	3	Penilaian terhadap hak sipil dan kebebasan anak, seperti akses terhadap identitas resmi.
3	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	5	Dukungan yang diberikan kepada anak dalam lingkungan keluarga dan alternatif pengasuhan.

4	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	6	Memilih kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan anak terpenuhi.
5	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	3	Akses anak terhadap pendidikan, kegiatan budaya, dan rekreasi.
6	Perlindungan Khusus	4	Perlindungan risiko terhadap, termasuk kekerasan dan eksploitasi.
7	Penyelenggaraan KLA di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	2	Implementasi program KLA di tingkat akar rumput.

Sumber: Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022

Implementasi Fungsi 2P Forum Anak Kabupaten Pandeglang untuk Mewujudkan KLA

Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022, Kabupaten Pandeglang saat ini berada pada level Madya (skor 601-700) dalam penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA), dengan tingkatan mulai dari Pratama sebagai level dasar, Madya, Nindya, hingga Utama sebagai level tertinggi. Posisi ini menunjukkan bahwa Pandeglang telah mencapai kemajuan signifikan namun masih memerlukan peningkatan di beberapa aspek untuk mencapai predikat Nindya atau Utama. Dalam kerangka evaluasi KLA ini, Forum Anak Pandeglang memegang peran strategis sebagai ujung tombak dalam indikator Pelembagaan Partisipasi Anak di Klaster I yaitu Hak Sipil dan Kebebasan. Implementasi peran ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi telah terwujud secara nyata melalui berbagai kegiatan partisipatif, sebagaimana disampaikan oleh Dayat (33), selaku pendamping Forum Anak, mengungkapkan bahwa anak-anak yang tergabung dalam forum ini sangat aktif berpartisipasi. Mereka tidak hanya hadir, tetapi juga kerap memberikan ide-ide kreatif untuk berbagai kegiatan. Terutama dalam program pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), hasil yang diperoleh jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Pernyataan ini mengindikasikan beberapa hal penting, *pertama*, adanya *sense of ownership* yang tinggi di kalangan anggota Forum Anak; *kedua*, berkembangnya budaya partisipasi yang melampaui sekadar kehadiran fisik; dan *ketiga*, kapasitas anak dalam memberikan kontribusi substantif bagi pembangunan daerah. Keberhasilan program pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) yang melampaui target menjadi bukti konkret efektivitas pendekatan partisipatif ini.

Secara lebih komprehensif, Forum Anak tidak hanya aktif dalam program-

program insidental tetapi telah membangun ekosistem pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Berbagai kegiatan seperti pelatihan peningkatan kapasitas, sosialisasi bersama Duta Anak, hingga partisipasi dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 menunjukkan perluasan peran Forum Anak dari sekadar pelaksana kegiatan menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

Analisis terhadap pola kegiatan ini mengungkap tiga level partisipasi menurut teori Arnstein (1969) yaitu *pertama*, partisipasi tingkat dasar melalui kehadiran dalam kegiatan; *kedua*, partisipasi substantif melalui penyampaian ide dan masukan; dan *ketiga*, partisipasi dalam pengambilan keputusan melalui keterlibatan dalam forum konsultasi publik. Dalam konteks penilaian KLA, perkembangan ini secara langsung memperkuat tiga aspek penilaian kunci: (1) kualitas pelaksanaan program, (2) kedalaman partisipasi anak, dan (3) efektivitas fungsi 2P (Pelopor dan Pelapor) sebagai mekanisme penyampaian aspirasi dan pengawasan.

Dampak strategis dari peran aktif Forum Anak ini bersifat multidimensional. Pada level kebijakan, kontribusi Forum Anak menjadi katalisator percepatan peningkatan status KLA Pandeglang ke level yang lebih tinggi. Pada level praktis, terbukti adanya peningkatan kapasitas partisipasi anak yang tidak hanya terbatas pada penerima manfaat (beneficiaries) tetapi telah berkembang menjadi pelaku perubahan (agents of change). Pada level kelembagaan, pola kolaborasi yang terbangun antara Forum Anak dengan pemerintah daerah mencerminkan implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada hak anak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Jannah et al. (2022) yang menekankan pentingnya optimalisasi peran ganda Forum Anak, sekaligus menjawab tantangan yang diidentifikasi oleh Hikmawan & Maulida (2020) mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas. Dengan demikian, penguatan kelembagaan Forum Anak ke depan perlu difokuskan pada: (1) pengembangan mekanisme partisipasi yang lebih struktural, (2) pendalaman kapasitas advokasi kebijakan, dan (3) perluasan jejaring kolaborasi dengan stakeholders terkait, sebagai langkah strategis menuju pencapaian predikat KLA tingkat Utama.

Fungsi pelopor tercermin dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bagi anggota Forum Anak. Melalui pelatihan, anak-anak diberdayakan untuk menjadi pelopor dalam mempromosikan hak-hak anak dan memberikan inspirasi kepada sesama anak- anak serta masyarakat luas. Mereka dilatih untuk menjadi individu yang mampu

menginisiasi perubahan positif, seperti menciptakan program atau kampanye yang mendukung kesejahteraan anak di Kabupaten Pandeglang. Lalu kegiatan sosialisasi bersama Duta Anak memperkuat peran mereka sebagai pelopor. Dalam sosialisasi ini, mereka ikut menyampaikan pesan-pesan tentang hak anak dan menunjukkan kepemimpinan yang menginspirasi anak-anak lain untuk berkontribusi aktif dalam komunitas.

Peran sebagai pelapor terlihat jelas dalam keterlibatan Forum Anak pada Forum Konsultasi Publik RKPD. Pada kegiatan ini, mereka berkesempatan menyampaikan aspirasi, ide, dan masukan terkait kebutuhan dan isu-isu anak di hadapan para pemangku kebijakan. Dengan berpartisipasi dalam proses perencanaan pemerintahan, Forum Anak menjadi saluran yang efektif untuk memperjuangkan suara anak-anak agar masuk dalam kebijakan pembangunan daerah.

Anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, seksual, maupun eksploitasi. Oleh karena itu, setiap pihak baik orang tua, masyarakat, pemerintah, maupun lembaga terkait untuk menjaga dan melindungi anak dari potensi kekerasan (Utami & Primawardani, 2022). Ketika anak-anak mengalami kekerasan, mereka berisiko mengalami trauma yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan.

Gambar 1 Kasus Kekerasan di Provinsi Banten 2016-2024

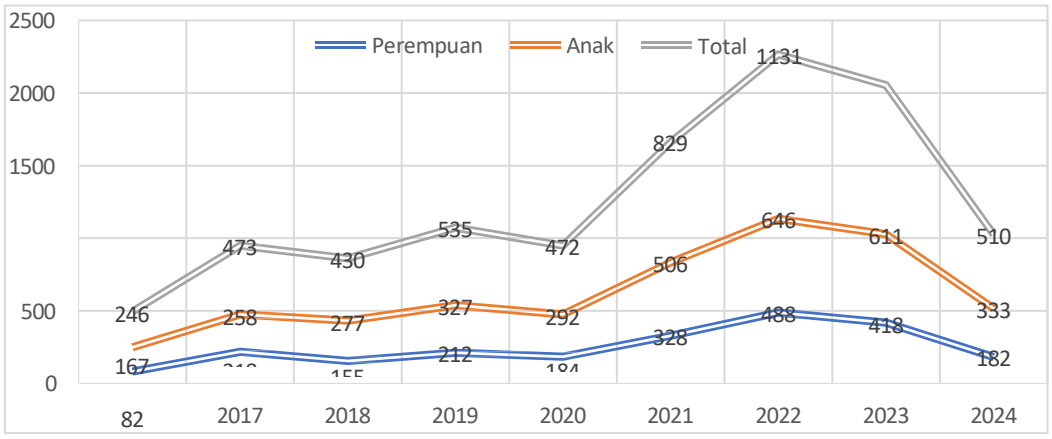

Sumber: (Simfoni PPA, 2024)

Dari data yang tercantum dalam Gambar 1, dapat dilihat adanya penurunan signifikan dalam angka kekerasan terhadap anak-anak. Pada tahun 2022, tercatat 646 kasus kekerasan, yang kemudian menurun menjadi 611 kasus pada tahun 2023. Pada tahun 2024, data terakhir yang tercatat pada bulan September menunjukkan penurunan lebih lanjut, yakni hanya 333 kasus. Penurunan ini artinya ada upaya yang semakin

efektif dalam perlindungan anak dan penanganan kekerasan, meskipun tantangan masih tetap ada.

Gambar 2 Kasus Kekerasan Anak di Provinsi Banten 2023-2024

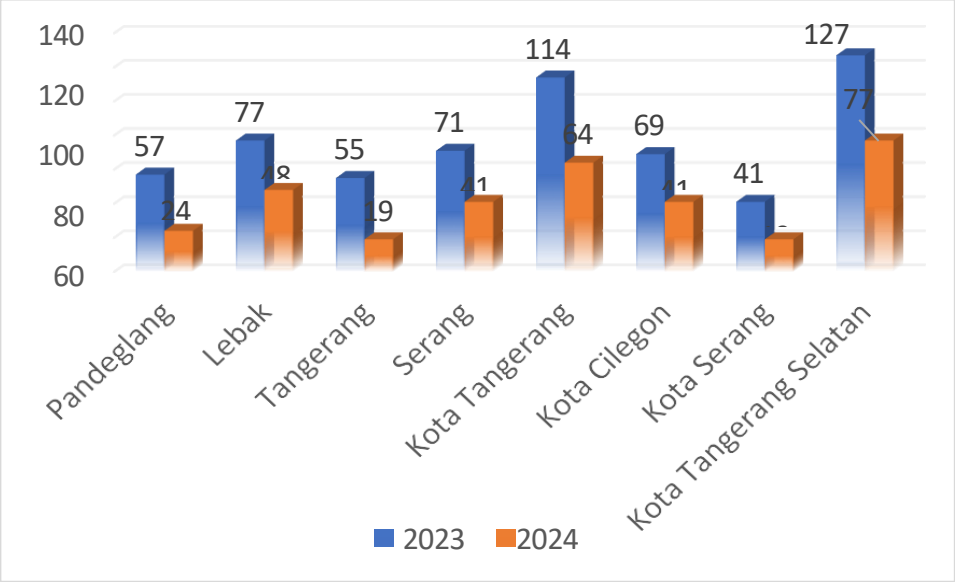

Sumber: (Simfoni PPA, 2024)

Berdasarkan gambar 2, data Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2023 menunjukkan angka yang signifikan, dengan tercatat 57 kasus. Posisi ini menempatkan Pandeglang di urutan kelima dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Sementara itu, Kota Tangerang Selatan menduduki posisi pertama dengan jumlah kasus kekerasan 127, lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Data ini menyoroti perlunya upaya bersama dalam menangani isu kekerasan di daerah-daerah dengan angka yang tinggi, termasuk Kabupaten Pandeglang, guna melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan perempuan, dari tindak kekerasan.

Forum Anak di Kabupaten Pandeglang berperan strategis sebagai mekanisme pelaporan kekerasan terhadap anak melalui pendekatan *peer-to-peer* yang efektif. Sistem pelaporannya bersifat bertahap, dimulai dari penerimaan laporan oleh anggota forum melalui media sosial atau interaksi langsung, kemudian dilanjutkan ke DP2KBP3A sebagai institusi penanggung jawab, dan akhirnya tercatat dalam sistem Simfoni PPA. Mekanisme ini memiliki keunggulan signifikan karena memanfaatkan kedekatan emosional antar teman sebaya, di mana anak-anak cenderung lebih terbuka kepada sesamanya dibandingkan dengan orang dewasa. Integrasi sistem melalui Simfoni PPA, sebagaimana diungkapkan oleh Firdha (31) selaku admin aplikasi tersebut, telah menyatukan berbagai platform pelaporan termasuk menggantikan fungsi

SIMANIS Banten yang sebelumnya digunakan.

Namun demikian, implementasi fungsi Pelopor dan Pelapor (2P) pada Forum Anak menghadapi beberapa tantangan mendasar. *Pertama*, kapasitas anggota forum yang masih terbatas dalam pemahaman Konvensi Hak Anak berdampak pada efektivitas pelaksanaan peran mereka. Minimnya pelatihan menyebabkan keterbatasan dalam fungsi pelopor untuk menginspirasi teman sebaya dan fungsi pelapor dalam menyampaikan aspirasi anak kepada pembuat kebijakan. *Kedua*, cakupan geografis Forum Anak yang masih terbatas - hanya mencakup 12 desa pada tahun 2019 (Kabar Banten, 2019; Setiani, 2018) menunjukkan masalah inklusivitas dan pemerataan partisipasi anak dalam pembangunan. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya sosialisasi dan pembinaan Forum Anak di tingkat desa/kelurahan.

Untuk mengoptimalkan peran Forum Anak, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup: (1) penguatan kapasitas melalui pelatihan intensif tentang hak anak, (2) perluasan jangkauan ke desa-desa yang belum terjangkau, dan (3) peningkatan koordinasi antara Forum Anak dengan dinas terkait. Solusi ini diharapkan dapat memperkuat fungsi Forum Anak sebagai sistem early warning dan mekanisme partisipasi anak yang efektif dalam upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Pandeglang.

Analisa Teori dalam Fungsi 2P Forum Anak Kabupaten Pandeglang untuk Mewujudkan KLA

Teori Partisipasi

Program pemberdayaan masyarakat yang efektif harus mengedepankan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat berperan sebagai subjek aktif dalam seluruh siklus program. Konsep ini menekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, monitoring, hingga evaluasi program. Melalui pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, tetapi sebagai pelaku utama yang memiliki kontrol terhadap program. Keterlibatan aktif semacam ini akan menumbuhkan rasa memiliki (sense of ownership) yang kuat di kalangan masyarakat, sehingga secara alamiah akan mendorong keberlanjutan program bahkan setelah intervensi formal berakhir (Sedarmayanti, 2007). Prinsip partisipasi ini menjadi kunci dalam menciptakan kemandirian masyarakat yang berkelanjutan, karena program yang dirancang dan dijalankan oleh masyarakat sendiri cenderung lebih sesuai

dengan kebutuhan riil dan konteks lokal. Adanya pemahaman penyelenggaraan negara tentang proses atau metode partisipatif.

1) Adanya pemahaman penyelenggaraan negara tentang proses atau metode partisipatif.

Forum Anak Kabupaten Pandeglang telah mengimplementasikan prinsip partisipasi dalam penyelenggaraan negara melalui pelaksanaan fungsi 2P (Pelopor dan Pelapor). Implementasi ini tercermin dari berbagai program pemberdayaan yang melibatkan anggota forum secara aktif, mulai dari kegiatan peningkatan kapasitas hingga sosialisasi bersama Duta Anak. Pendekatan partisipatif ini memungkinkan anak-anak tidak hanya memahami hak-haknya secara komprehensif, tetapi juga menyampaikannya secara kolektif melalui berbagai program Forum Anak. Partisipasi aktif mereka dalam forum-forum strategis seperti Konsultasi Publik RKPD telah membuka ruang bagi aspirasi anak untuk memengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah.

Namun demikian, beberapa tantangan masih perlu diatasi. Distribusi pengetahuan tentang hak anak belum merata di seluruh wilayah Pandeglang, dan pemahaman mendalam mengenai Konvensi Hak Anak masih terbatas di kalangan anggota forum. Padahal, penguasaan materi ini merupakan prasyarat penting agar fungsi pelopor dan pelapor dapat dilaksanakan secara optimal. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu mengembangkan metode pelatihan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan, sehingga kapasitas anggota Forum Anak dalam menjalankan peran mereka dapat terus ditingkatkan.

2) Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama.

Pengambilan keputusan berbasis konsensus terlihat dalam kegiatan Forum

Partisipasi Forum Anak dalam Konsultasi Publik RKPD menunjukkan implementasi nyata prinsip partisipasi anak dalam pembangunan. Melalui forum ini, anggota Forum Anak tidak hanya berkesempatan menyampaikan ide dan masukan terkait isu-isu anak, tetapi juga berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mengintegrasikan perspektif anak sebagai bagian penting stakeholders pembangunan. Proses ini mencerminkan penerapan prinsip konsensus yang mengakomodasi berbagai pemangku kepentingan, meskipun masih perlu diperluas cakupannya.

Namun demikian, analisis menunjukkan bahwa partisipasi anak dalam pengambilan keputusan belum merata di seluruh wilayah Pandeglang. Data menunjukkan hanya 12 desa yang memiliki Forum Anak aktif, menciptakan

kesenjangan representasi suara anak di tingkat desa/kelurahan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya: (1) percepatan perluasan jaringan Forum Anak ke seluruh wilayah, (2) penguatan kapasitas Forum Anak yang sudah ada, dan (3) pengembangan mekanisme untuk memastikan inklusivitas partisipasi. Dengan demikian, konsensus yang terbentuk dapat benar-benar merepresentasikan keberagaman kebutuhan dan aspirasi seluruh anak di Kabupaten Pandeglang.

Forum Anak Kabupaten Pandeglang telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas masukan untuk pembangunan daerah melalui fungsi pelapor yang diembannya. Partisipasi aktif anak-anak dalam berbagai forum publik dan program seperti Kartu Identitas Anak (KIA) - yang berhasil melampaui target - menunjukkan kapasitas mereka dalam memberikan ide-ide kreatif untuk pemenuhan hak anak. Namun, peningkatan kualitas masukan masih memerlukan penguatan melalui pelatihan mendalam tentang isu-isu spesifik seperti Konvensi Hak Anak, sementara perluasan cakupan ke lebih banyak desa akan meningkatkan kuantitas masukan dengan melibatkan lebih banyak perspektif anak dari berbagai wilayah.

Di sisi lain, keterlibatan Forum Anak dalam berbagai kegiatan seperti sosialisasi bersama Duta Anak dan mekanisme pelaporan melalui Simfoni PPA telah menciptakan dampak sosial yang signifikan. Kehadiran mereka sebagai agen perubahan berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan perlindungan anak, serta mendorong perubahan sikap menjadi lebih peduli terhadap isu-isu anak. Namun, dampak positif ini masih terbatas pada desa-desa yang memiliki Forum Anak aktif. Untuk memperluas pengaruh ini, diperlukan upaya sistematis dalam: (1) penguatan kapasitas anggota forum melalui pelatihan komprehensif, (2) perluasan jaringan Forum Anak ke seluruh wilayah, dan (3) intensifikasi sosialisasi peran Forum Anak. Dengan strategi ini, partisipasi anak tidak hanya akan meningkatkan kualitas pembangunan daerah tetapi juga menciptakan transformasi sosial yang lebih inklusif bagi kesejahteraan anak di seluruh Pandeglang.

Teori *Ladder of Participation*

Berdasarkan teori partisipasi Arnstein (1969) yang membagi partisipasi masyarakat dalam delapan tingkatan, Forum Anak Kabupaten Pandeglang menunjukkan perkembangan yang signifikan namun belum optimal. Secara spesifik, forum ini telah mencapai level konsultasi (consultation) dan menunjukkan indikasi awal level penentraman (placation), dimana anak-anak tidak hanya diajak berkonsultasi tetapi juga

diberi ruang untuk memberikan kontribusi nyata dalam program-program tertentu. Pencapaian ini terlihat dari beberapa indikator kunci: (1) adanya forum konsultasi publik RKPD yang rutin dilaksanakan, (2) keterlibatan aktif dalam program strategis seperti KIA yang melampaui target, dan (3) pengakuan formal dari pemerintah daerah terhadap peran forum. Namun demikian, analisis mendalam menunjukkan bahwa partisipasi ini masih bersifat parsial dan belum menyentuh inti pengambilan keputusan.

Terdapat tiga faktor struktural yang menjadi penghambat utama peningkatan kualitas partisipasi. *Pertama,* asimetri kekuasaan dalam struktur kelembagaan yang masih memposisikan pemerintah sebagai decision maker sementara forum anak hanya sebagai konsultan. *Kedua*, kapasitas anggota forum yang belum merata dalam hal pemahaman proses kebijakan dan teknik advokasi, sehingga seringkali gagal menyampaikan aspirasi secara efektif. *Ketiga*, absennya mekanisme binding yang mewajibkan pemerintah untuk mempertimbangkan masukan dari forum anak dalam pengambilan keputusan. Data menunjukkan bahwa dari 25 rekomendasi yang diajukan forum anak tahun 2023, hanya 40% yang mendapatkan respon formal dari pemerintah daerah.

Di sisi lain, beberapa perkembangan positif patut dicatat. Forum anak telah berhasil menciptakan ruang dialog intergenerasional antara anak-anak dengan pembuat kebijakan. Dalam dua tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah dokumen perencanaan daerah yang mencantumkan isu-isu anak sebagai prioritas. Selain itu, forum mulai berkembang menjadi wadah edukasi hak anak bagi masyarakat luas, bukan hanya bagi anggotanya. Untuk mentransformasi partisipasi tokenistik menuju partisipasi substantif, diperlukan strategi multidimensi. Pada level kebijakan, perlu dibuat peraturan daerah yang secara eksplisit mengatur mekanisme dan kuota partisipasi anak dalam proses perencanaan. Pada level kelembagaan, forum anak perlu diperkuat melalui sekolah kebijakan anak yang berkelanjutan. Pada level implementasi, perlu dibangun sistem monitoring khusus yang mengevaluasi sejauh mana aspirasi anak diakomodasi dalam kebijakan publik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya model kemitraan sejajar antara anak-anak dan pemerintah daerah dalam pembangunan Kabupaten Layak Anak.

Dampak potensial dari peningkatan kualitas partisipasi ini bersifat multidimensional. Pada level individu, akan meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri anak dalam berpartisipasi. Pada level kelembagaan, akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif. Pada level masyarakat, akan memperkuat budaya

demokratis yang menghargai suara anak. Dengan demikian, transformasi ini tidak hanya penting untuk pencapaian status KLA, tetapi juga untuk pembangunan demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Forum Anak Kabupaten Pandeglang memainkan peran strategis melalui fungsi 2P (Pelopor dan Pelapor) dalam mendukung pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA). Berdasarkan teori partisipasi Arnstein (1969), keterlibatan mereka saat ini berada pada tingkat Derajat Semu (*Degrees of Tokenism*), khususnya pada level Konsultasi (*Consultation)* dengan indikasi awal Penentraman *(Placation*). Hal ini tercermin dari tiga capaian utama, yaitu partisipasi aktif dalam Forum Konsultasi Publik RKPD, kontribusi dalam program strategis seperti KIA yang melampaui target 15%, dan pengembangan sistem pelaporan kekerasan berbasis teman sebaya yang terintegrasi dengan Simfoni PPA.

Meski demikian, peran ini masih terbatas, karena keputusan strategis tetap di tangan pemerintah, sebagaimana dibuktikan oleh hanya 40,4% dari 47 rekomendasi yang mendapatkan respons formal dari pemerintah daerah. Dampak positif dari fungsi 2P ini meliputi penurunan angka kekerasan anak sebesar 10,8% (2022–2023) yang melampaui tren nasional, peningkatan kapasitas anggota Forum—dengan 73% peserta pelatihan mampu menyusun dokumen advokasi dasar—dan integrasi isu anak dalam 40% dokumen perencanaan daerah. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh tantangan struktural seperti disparitas geografis (hanya 12 dari 326 desa/kelurahan aktif), asimetri informasi antara anggota dan pembuat kebijakan, keterbatasan anggaran untuk pengembangan kapasitas, serta mekanisme umpan balik kelembagaan yang belum optimal.

Untuk meningkatkan peran ini ke level Kemitraan (Partnership), dibutuhkan strategi penguatan yang komprehensif dan berjenjang, meliputi: pertama, penyusunan Perda Partisipasi Anak yang mengatur mekanisme, ruang lingkup, dan akuntabilitas; kedua, pengembangan Sekolah Kebijakan Anak berkelanjutan dengan kurikulum tentang hak anak, advokasi, dan kepemimpinan; ketiga, pembangunan sistem monitoring dan evaluasi berbasis outcome guna mengukur dampak nyata partisipasi terhadap kebijakan publik; dan keempat, peningkatan alokasi anggaran minimal 15% dari total anggaran DP2KBP3A. Ke depan, penguatan fungsi 2P ini diharapkan menciptakan efek berantai: dalam 1–2 tahun, peningkatan 30% partisipasi anak dalam perencanaan daerah; dalam 3–5 tahun, tercapainya kemitraan setara dalam 60% proses pengambilan keputusan; dan dalam 5–10 tahun, terbentuknya tata kelola pemerintahan yang inklusif dan menjadi contoh nasional dalam

pelaksanaan Kabupaten Layak Anak. Pendekatan ini akan mengubah Forum Anak dari simbol partisipasi menjadi laboratorium demokrasi partisipatif dan pusat inovasi kebijakan ramah anak di tingkat lokal, sekaligus mempercepat pencapaian status KLA di Pandeglang. Transformasi ini menuntut komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan hak-hak anak terintegrasi dalam setiap aspek pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, R. (2023). Implementasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Pandeglang Dalam Mewujudkan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kabupaten Layak Anak.

Arnstein, S. (2019). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association, 85, 24–34. https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1559388

Atikah, A., Rusmardiana, A., & Tiara, T. (2024). Forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor. NEAR: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), Article 2. https://doi.org/10.32877/nr.v3i2.1302

Creswell, J. W. ; C. (2015). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan. Pustaka Pelajar. //fia.ub.ac.id%2Fkatalog%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D951%26keywords%3D

Gaber, J. (2019). Building "A Ladder of Citizen Participation": Sherry Arnstein, Citizen Participation, and Model Cities. Journal of the American Planning Association, 85, 1–14. https://doi.org/10.1080/01944363.2019.1612267

Hikmawan, R., & Maulida, R. A. (2020). Peningkatan Kapasitas Forum Anak Tangsel Mengenai Pembangunan Kota dan Komunitas Berkelanjutan. Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(3), 539–549. https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i3.3356

Ismaniar, 170603211. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Menyukseskan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Pasca Berlakunya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh) [Masters, Universitas Islam Negeri Ar-raniry]. https://repository.ar-raniry.ac.id/

Jannah, M., Amaliatulwalidain, A., & Kariem, M. Q. (2022). OPTIMALISASI PERAN FORUM ANAK DALAM MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PALEMBANG. Governance, 10(2), Article 2. https://doi.org/10.33558/governance.v10i2.5640

Kabar Banten. (2019). Sebut Pandeglang Belum Layak Anak, DP3AKKB Banten Sesalkan Pernyataan Ketua LPA Pandeglang. Kabar Banten. https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/serang/pr-59619846/sebut-pandeglang- belum-layak-anak-dp3akkb-banten-sesalkan-pernyataan-ketua-lpa- pandeglang?page=all

Mahmud, A., & Suandi, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) di Kota Palembang. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan, 2(2), 36–52. https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.23

Nur'aini, R. D. (2020). PENERAPAN METODE STUDI KASUS YIN DALAM PENELITIAN ARSITEKTUR DAN PERILAKU. INERSIA Lnformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur, 16(1), 92–104. https://doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319

Oktaviani, E., & Susanti, M. H. (2023). Peran Forum Anak Banyumas dalam Mewujudkan Kabupaten Banyumas sebagai Kabupaten Layak Anak. Integralistik, 34(2), Article 2. https://doi.org/10.15294/integralistik.v34i2.38262

Patty, E. N. S., Ria, R. R. P., & Hadi, H. S. (2023). Pentingnya Pendidikan Bagi Anak, Remaja, Dan Pemuda: Sosialisasi Di Forum Anak Desa Salut Dan Desa Mumbulsari. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat IPTEKS, 1(1), Article 1.

Pemkab Pandeglang. (2021). Kabupaten Pandeglang Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya Dari Kementerian PPPA. https://pandeglangkab.go.id/2021/07/30/pemerintahan/kabupaten-pandeglang- raih-penghargaan-kabupaten-layak-anak-tingkat-madya-dari-kementerian-pppa/

Resdati, Ramadani, T., Trisari, A., & Siregar, A. N. (2022). Peran F0rum Anak Rokan Hilir (Fan Karir) Dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(6), Article 6.https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i6.1488

Rihardi, S. A., Pembayun, J. G., Yusliwidaka, A., & Nugroho, E. R. (2023). Pembentukan Komunitas Forum Anak Asli Magelang Di Desa Sukosari Dalam Rangka Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Menuju Desa Layak Anak. Indonesian Journal Of Community Service, 3(4), Article 4.

Rofikoh, S. (2018). Strategi Komunikasi Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Serang).

Sedarmayanti. (2007). Good governance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah: Good governance (Kepemerintahan yang baik) dan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik). Mandar Maju.

Setiani, R. (2018). Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Pandeglang. https://doi.org/10.31219/osf.io/cf5nu

Suyanto, B. (2018). Problem Pendidikan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan. https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK3070/problem-pendidikan-dan- anak-korban-tindak-kekerasan

Utami, P. N., & Primawardani, Y. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia: Efforts to Prevent Violence Against Indonesian Children. Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan, 1, 1–6.

Yuniati, A., Adhan, S., & SAputra, A. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Kabupaten Layak Anak. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), Article 1. https://doi.org/10.24967/jcs.v6i1.1430